

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DI DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO

Moke Wilil¹⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Pascasarjana Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This study aims to analyze and determine Community Participation in Village Development Programs in Abenaho District, Yalimo Regency, as well as analyze the supporting and inhibiting factors of community participation in village development in Abenaho District, Yalimo Regency. This study uses a qualitative descriptive approach conducted in Abenaho District, Yalimo Regency, the determination of informants is carried out by snowball. Data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the form of community participation in village development in Abenaho District, Yalimo Regency, the form of community participation contributing to the village development program was starting from the delegation of authority stage, the community had the authority to participate in determining the priority of development programs in their village through musrembang, and the results of the musrembang proposed as a priority development program. Then in the partnership stage, the community partners with providers of tools and materials needed to carry out development programs. Then the stage, community consultation consults with village assistants regarding the development program they have launched and the reporting and accountability mechanisms. Then the information stage is disseminated effectively so that the community knows information about the development program in their village. Then it is related to the form of community participation in the form of delivering voices to fight for their rights and the open access provided. Supporting factors are the existence of social solidarity, responsibility and intense information dissemination. Then the inhibiting factor is the misunderstanding factor, and mutual suspicion from the community.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, penentuan informan dilakukan secara snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo, Bentuk Partisipasi masyarakat berkontribusi pada program pembangunan kampung adalah dimulai dari tahap pelimpahan kewenangan, masyarakat memiliki kewenangan dalam berpartisipasi untuk menentukan prioritas program pembangunan di kampung mereka melalui musrembang, dan hasil musrembang tersebut diajukan sebagai prioritas program pembangunan. Kemudian tahapan kemitraan, masyarakat bermitra dengan penyedia alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembangunan. Kemudian tahapan, konsultasi masyarakat berkonsultasi kepada pendamping kampung mengenai program pembangunan yang mereka canangkan dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawabannya. Kemudian tahapan informasi disebarluaskan secara efektif agar masyarakat mengetahui informasi mengenai program pembangunan di kampung mereka. Kemudian terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat berupa penyampaian voice untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan keterbukaan access yang diberikan. Faktor pendukung adalah adanya solidaritas sosial, tanggung jawab dan penyebaran informasi yang intens. Kemudian faktor penghambatnya adalah faktor kesalahpahaman, dan saling curiga dari masyarakat.

Keyword: *Participation, Community, Village Development, Abenaho, Yalimo*

PENDAHULUAN

Upaya pembangunan desa agar lebih berhasil dan sejahtera perlu dilakukan untuk melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan desa dalam pembangunan berkelanjutan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap desa di Indonesia (Nain, 2019). Pelaksanaan pembangunan desa merupakan respon terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang amanat desa dan memberikan kepastian hukum bagi desa.

Setiap desa di Indonesia perlu dilindungi dan berdaya untuk menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis (Ratnadila, 2018). Otonomi desa merupakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur (Barniat, 2019). Pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan desa masyarakat mandiri dan swadaya (Siregar, 2017). Pembangunan daerah mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan sebagai upaya percepatan pembangunan desa melalui penyediaan sarana dan prasarana, yaitu untuk menciptakan ekonomi daerah yang efektif pengembangan (Endah, 2020).

Pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat desa dapat menghasilkan hasil yang lebih efisien daripada pembangunan desa berdasarkan mekanisme program (Laily, E. & Imro'atin, 2015). Ini karena dianggap mampu memberikan peluang bagi desa untuk mengelola rumah tangganya disertai dengan kewenangan keuangan. Fokus utama dalam membangun desa yang lebih maju terletak pada potensi dan masyarakat itu sendiri (Nadir, 2013).

Dalam hal ini, potensi desa yang dimaksud semuanya adalah alam sumber daya dan sumber daya manusia yang dimiliki di desa, sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk

kelangsungan dan perkembangan desa (Suwaryo, 2011). Dalam mendukung potensi yang ada, perlu diperhatikan aspek lain berupa pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Jumlah penduduk atau masyarakat desa merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek dan subjek pembangunan (Luthfia, 2013). Objek pembangunan dilihat dari aspek kualitas, masih perlu diberdayakan. Sedangkan sebagai subjek pembangunan, peranannya sangat penting sebagai kekuatan (aktor) penentu proses pengembangan di pedesaan. Selain faktor dari masyarakat, faktor potensial dalam desa juga perlu diperhatikan. Berdasarkan potensi yang dimiliki desa, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui penghidupan strategi (Pamungkas, 2019).

Dalam hal ini, mata pencaharian terkait dengan segi lima aset, yaitu prinsip dasar dalam pengelolaan mata pencaharian. Prinsip dasar aset modal manusia, modal alam, modal finansial, modal sosial, dan modal fisik. Keberadaan aset menjadi instrumen kesadaran yang bisa merevolusi mentalitas masyarakat jika disampaikan secara intens kepada masyarakat atau individu (Ambarwati, dkk, 2016).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kritik terhadap kebijakan yang selama ini bersifat top down yang dalam setiap program merupakan kehendak pemerintah pusat (Korten & Sjahir, 1988:87). Sebaliknya, pembangunan yang berangkat dari masyarakat cenderung bertujuan memberikan masyarakat celah untuk menggerakkan seluruh sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan mereka.

Perencanaan pembangunan nasional telah memberikan pedoman bagaimana pembangunan desa sebagai prioritas. Muatan ini mengacu pada sebagian besar penduduk bermukim di kawasan desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum di tingkat mikro, kampung mempunyai batas wilayah

kewenangan untuk mengelola kepentingan masyarakat di wilayahnya berdasar latar sejarah dan tradisi setempat yang telah mendapat pengakuan dan penghormatan negara. Sehingga pembangunan kampung merupakan cerminan atas pembangunan nasional.

Otonomi daerah tidak semata berbicara tentang pengurangan sentralisasi di tangan pemerintah pusat, perbaikan pelayanan publik maupun penciptaan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semangat otonomi daerah juga mendorong tumbuhnya demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Banyak pihak yakin betul bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan roh dalam otonomi daerah. Jika berbicara tentang demokrasi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka kata kuncinya adalah partisipasi masyarakat.

Provinsi Papua adalah salah satu provinsi urutan ke 34 di Indonesia yang memiliki sekitar 5 ribu kampung yang tercatat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang akan menerima dana kampung sekitar 4 triliun lebih pada tahun 2018. Sebuah peluang ekonomis bagi orang asli Papua untuk memikirkan, merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai kondisi riil/potensi di wilayahnya masing-masing.

Kabupaten Yalimo sebagai salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri dari sejumlah kampung dengan jumlah penduduknya yang saat terus dipacu untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya sendiri-sendiri. Kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo Provinsi Papua saat ini membangun kampung-kampungnya melalui semangat Otonomi Khusus melalui Partisipasi Masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan di daerah tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam melakukan penulisan ini

adalah menggunakan metode penelitian Deskriptif. Nazir, (2013:63) menjelaskan bahwa: "Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang".

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sampai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan pada kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Apa saja kendala-kendala dalam bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam mendukung program pembangunan di distrik Abenaho di Kabupaten Yalimo. Dalam ruang lingkup penelitian ini, yang menjadi sasaran dalam penjangkauan data/informasi adalah seluruh masyarakat pada kampung-kampung di Distrik Abenaho yang merupakan usia produktif dan bagaimana dampaknya terhadap partisipasi pembangunan di distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Penelitian ini dilakukan di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo dengan pertimbangan bahwa penduduk di distrik tersebut memiliki partisipasi masyarakat dalam perencanaan Implementasi pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Instrumen/alat yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara, alat rekam dan alat tulis berupa bolpen/pensil untuk mencatat setiap informasi yang disampaikan responden. Termasuk merekam data/informasi pada sumber informasi lainnya.

Adapun informan yang dijadikan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal di di kampung-kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Distrik Abenaho. Jumlah informan yang diambil yang dianggap representatif adalah sebanyak 10 orang tersebar dalam 5 laki-laki dan 5 masyarakat di setiap kampung yang dapat dijangkau di dalam Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Adapun teknik yang

digunakan dalam penentuan informan adalah snowball dengan melibatkan informan kunci sebagai *guide*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kancah (*field research*).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan tahapan interpretasi, dan merumuskan hasil interpretasi tersebut dengan memilah data untuk mengambil kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung

Wicaksono (2013: 66) membagi tingkatan partisipasi masyarakat dari tingkatan tertinggi ke rendah.

Delegated power, atau pelimpahan wewenang dalam pembuatan keputusan untuk rencana tertentu. Ciri dari delegated power yang kentara adalah tidak adanya tekanan dari atas, melainkan pemerintah dan masyarakat bernegosiasi. Adapun terkait dengan pendelegasian masyarakat dalam partisipasi mereka pada program pembangunan kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Masyarakat ikut terlibat dalam menyampaikan aspirasinya. Untuk pembangunan kampung. Terdapat program yang berjalan misalnya pembangunan infrastruktur berupa jalanan untuk menghubungkan kampung dengan dunia luar. Saya sebagai kepala kampung mengusulkan program itu, karena penting, dan diterima saat musrembang, sebagai prioritas program pembangunan di kampung

Informan di atas mengungkapkan bahwa masyarakat kampung terkait dengan proses perencanaan program pembangunan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat musrembang. Hasil dari rapat tersebut itulah yang menjadi program usulan yang diajukan agar dapat teralisasi melalui program pembangunan kampung. Kelibatan asyarakat mendapatkan akses

untuk mengeluarkan aspirasi pada waktu musrenbang. Kemudian partisipasi juga terwujud dengan kerjasama masyarakat melalui perwakilan tertentu dalam kegiatan yang diadakan dinas terkait seperti pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kapasitas.

Partnership, atau perundingan untuk menentukan keputusan bersama dengan pemerintah. Partnership dicirikan dengan pembagian wewenang dalam rencana program, maupun kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan suatu masalah. Adapun terkait dengan kemitraan dalam partisipasi masyarakat pada program pembangunan kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Ya dalam membangun kampung, misalnya infrastruktur jalan. Kita bermitra dengan penyedia alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Agar mereka bisa menyediakan, agar kita bisa kerja. Karna yang masyarakat inginkan, mereka yang kerja. Bukan pihak ketiga, supaya kami juga terlibat untuk membangun kampung kami..

Informan di atas mengungkapkan bahwa terkait dengan kemitraan melalui dalam pembangunan kampung di Distrik Abenaho, masyarakat yang berperan langsung sebagai tenaga penggerak pembanguan, dengan merekay ang terlibat sebagai pekerja. Adapun terkait dengan kemitraan, masyarakat bekerja sama dengan pengusaha penyedia alat-alat dan bahan bangunan untuk program pembangunan kampung, termasuk diantaranya adalah pembangunan jalan yang menghubungkan antar kampung, antar kampung, dusun, dan antar distrik. Agar akses jalan terbuka dan semakin mudah proses mobilitas dan transportasi, sehingga harapannya ke depan, tidak terdapat lagi lokai-lokasi kampung yang terisolir oleh akses jalan, sehingga dapat mempermudah pembangunan pada sektor yang lain seperti pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi. Olehnya, program pembangunan infrasturktur

terutama pembukaan jalan menjadi sangat penting untuk membuka akses dan menstimulasi program pembangunan lainnya yang ada di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo.

Consultative, atau dalam bentuk undangan untuk berkonsultasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan kebijakan.

Konsultasi masyarakat dalam program pembangunan dilakukan dengan menanyakan langsung kepada fasilitator kampung dalam kegiatan pembangunan, mengenai divisi dan tugas masing-masing. Adapun terkait dengan konsultasi masyarakat dalam partisipasi mereka pada program pembangunan kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut

Konsultasi dengan pendamping kampung yang ditugaskan di setiap kampung yang ada di Distrik Abenaho. Karena kami masyarakat juga awam dengan barang begini. Jadi para pendamping yang ditugaskan membantu kami jika ada hal yang tidak diketahui, baik para aparatur kampung, maupun anggota masyarakat, akan bertanya ke pendamping, yang ditugaskan oleh kementerian.

Informan di atas mengungkapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh para masyarakat dalam berpartisipasi dalam program pembangunan adalah dengan merujuk pada setiap keputusan yang disepakati kepada pihak yang memiliki wewenang dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan peran mereka dalam berkontribusi pada sebuah program pembangunan di kampung mereka.

Informing, atau masyarakat hanya mendapatkan informasi mengenai suatu kegiatan. Dalam hal ini informasi memuat hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan program. Adapun terkait dengan informasi masyarakat dalam partisipasi mereka pada

Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

kalo memberi informasi biasanya melalui pertemuan. Kadang juga pengumuman disampaikan, juga menggunakan pengeras suara (megafon) ada juga berupa undangan lisan atau tertulis.

Berdasarkan pendapat informan, partisipasi masyarakat dalam bentuk *informing* ini dilakukan dengan tertulis tentang akan adanya kegiatan pembangunan. artinya, masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung

Eko (2004:220) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah *voice*, akses, dan kontrol.

Voice, diartikan sebagai hak dan sikap masyarakat dalam mengeluarkan aspirasinya. Ini bertujuan untuk memengaruhi kebijakan dan agenda kolektif untuk mencapai tujuan bersama. *voice* memiliki beberapa alternatif untuk penyampaian, seperti opini melalui forum dan media massa. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Dalam pertemuan atau rapat (Muskam) untuk membicarakan kesepakatan untuk mencapai satu tujuan dalam program pembangunan sesuai dengan keputusan dan aturan yang berlaku di kampung. Contoh: memberi pendapat, saran, dan usulan. Dan diputuskan secara bersama, untuk kepentingan bersama

Informan di atas mengungkapkan penyampaian suara masyarakat dilakukan dengan mengeluarkan aspirasinya dalam pertemuan yang diadakan kampung. Penyampaiannya dalam bentuk pendapat, saran, dan usulan.

Access, yakni masuknya masyarakat ke dalam tataran pemerintahan. artinya masyarakat memiliki peran memengaruhi dan menentukan kebijakan. akses masyarakat memiliki dua aspek penting, terbuka dan ikut serta. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Kita ini diberikan kesempatan ikut rapat, menyampaikan pendapat, dan terlibat di kegiatan kampung dan ada program. Masyarakat ikut terlibat dan semuanya jadi terbuka dan berkeinginan untuk bersama-sama membangun kampung

Akses masyarakat sebagaimana dikatakan informan terwujud dengan terlibatnya masyarakat dalam program pembangunan seperti padat karya. Artinya, masyarakat tidak hanya diberikan kewenangan untuk mengeluarkan pendapat saja, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Control berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mekanisme politik. kontrol diidentifikasi menjadi kontrol internal dan eksternal yang mana masyarakat mengawasi berjalannya kebijakan sekaligus mengevaluasi risiko kegiatan pembangunan. Adapun terkait dengan akomodasi penyampaian pendapat masyarakat dalam partisipasi mereka pada Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Terlibat secara langsung misalnya pada program padat karya, semua masyarakat. pembuatan jalan yang menghubungkan setiap dusun dan kampung. Ini penting untuk membuka akses transportasi dan distribusi. Makanya masyarakat senang dan semuanya mau mengerjakan.

Informan di atas mengungkapkan bahwa masyarakat dalam hal kontrol tidak

terlalu aktif, tetapi sebagian masyarakat hanya terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor Pendukung dan Penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Dana Kampung

Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Program Dana Kampung di Kampung Armo Pesisir, Distrik Sarmi adalah:

Pertama, solidaritas sosial masyarakat yang tinggi. Hal ini karena dasar identitas dan keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk mendukung perubahan ke arah yang lebih baik melalui Program Pembangunan Kampung di Distrik Abenaho

Kedua, pemberian tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembangunan yang selaras dengan kesepakatan bersama yang telah dirancang dalam musrenbang..

Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Implementasi Program adalah:

Pertama, masih adanya salah paham antara pemerintah dan sebagian masyarakat mengenai pembangunan, sehingga mengurangi minat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Perselisihan ini sendiri biasanya menyangkut jumlah anggaran dan biaya pembangunan.

Kedua, masih adanya sikap saling mencurigai antara pemerintah dan sebagian masyarakat yang mengacu pada lemahnya transparansi anggaran termasuk ketidaksesuaian anggaran yang digunakan dengan hasil pembangunan itu sendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama tingkat Partisipasi masyarakat berkontribusi pada program pembangunan kampung adalah dimulai dari tahap pelimpahan kewenangan, masyarakat memiliki kewenangan dalam berpartisipasi untuk menentukan prioritas program pembangunan di kampung

mereka melalui musrembang, dan hasil musrembang tersebut diajukan sebagai prioritas program pembangunan. Kemudian tahapan kemitraan, masyarakat bermitra dengan penyedia alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembangunan. Kemudian tahapan, konsultasi masyarakat berkonsultasi kepada pendamping kampung mengenai program pembangunan yang mereka canangkan dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawabannya. Kemudian tahapan informasi disebarluaskan secara efektif agar masyarakat mengetahui informasi mengenai program pembangunan di kampung mereka.

Kedua, faktor pendukung implementasi adalah masih kuatnya solidaritas sosial, tanggung jawab dan sosialisasi. Kemudian faktor penghambat termasuk masih adanya salah paham, dan saling mencurigai antara pemerintah dan masyarakat.

adanya elaborasi jaringan sosial antara BUMDES dengan pihak eksternal. *Kedua*, Menyebabkan pengelola mengalami

kesulitan dan menghabiskan dana yang besar untuk mendapatkan surat izin operasional unit usahanya. Selain itu juga, BUMDES kurang mendapat sorotan dari masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai pihak ketiga guna membangun kerjasama usaha masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menjadi pelaksana atau eksekutor lapangan, pengawas dalam mengontrol pelaksanaan program pembangunan kampung di Distrik Abenaho Kabupaten Yalimo. Untuk meningkatkan bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program pembangunan kampung di tingkat distrik.

Kemudian, penting adanya sistem laporan penggunaan anggaran yang transparan agar tidak mengakibatkan adanya saling mencurigai maupun perselisihan antara pihak pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, T., Nurjannah, D., & Fitriasari, F. (2016). *IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (GaKin)*. *IbM Usaha Kreatif Keluarga Miskin (Gakin)*, 3(1), 39-46.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *JASP*.
- Eko, S. (2004). *Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi*, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR-RI”. *Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa*.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Korten, D. C. & Sjahrir. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik urgensi desa di era otonomi daerah. *Journal of Rural and Development*, 4(2).
- Nain, U. (2019). *Pembangunan desa dalam perspektif sosiohistoris*. Garis Khatulistiwa.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan Desa Tertinggal: Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 12(2), 111-128.
- Siregar, R. (2017). Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. *Pros. Semin. Nas. Tah. Fak. Ilmu Sos. Univ. Negeri Meda*, 1, 378-381.
- Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. *governance*, 2(1), 1-12.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wijaksono, S. (2013). Pengaruh lama tinggal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 24-32.